

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, telah dilakukan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang membahas topik yang serupa sebagai bahan referensi tambahan peneliti, diantaranya:

- 1) Sebuah artikel yang ditulis oleh Fithra Faisal Hastiadi, dkk pada tahun 2021 yang berjudul “Indonesia's Role in the Global Economic Recovery in the Post-COVID-19 Era: A Perspective from the G20 Presidency”.⁷ Artikel jurnal tersebut membahas peran Indonesia sebagai ketua G20 pada tahun 2022 dalam memimpin upaya global untuk memulihkan ekonomi pasca COVID-19. Artikel ini mengidentifikasi beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh Indonesia sebagai ketua G20, termasuk kebijakan ekonomi global yang tidak pasti dan perubahan geopolitik yang cepat. Artikel ini juga menyoroti beberapa kebijakan yang dapat dilakukan oleh Indonesia dalam memfasilitasi pemulihan ekonomi global, termasuk peningkatan investasi dalam infrastruktur dan teknologi, memperkuat perdagangan bebas dan terbuka, serta mempercepat digitalisasi dan inovasi. Selain itu, artikel ini juga membahas tentang pentingnya kerja sama multilateral dalam

⁷ Fithra Faisal Hastiadi, dkk. (2021). *Indonesia's Role in the Global Economic Recovery in the Post-COVID-19 Era: A Perspective from the G20 Presidency*.

memulihkan ekonomi pasca COVID-19, dan Indonesia sebagai negara anggota G20 harus memainkan peran penting dalam memastikan koordinasi dan kolaborasi antarnegara yang efektif. Dalam kesimpulannya, artikel ini menyimpulkan bahwa Indonesia sebagai ketua G20 harus memimpin upaya global untuk memulihkan ekonomi pasca COVID-19 dengan mengadopsi kebijakan yang tepat dan memperkuat kerja sama multilateral.

- 2) Artikel ilmiah yang ditulis oleh Rizal Affandi Lukman pada tahun 2021 yang berjudul “Indonesia's Priorities and Opportunities as G20 Chair in 2022”. Artikel jurnal tersebut membahas prioritas Indonesia sebagai ketua G20 pada tahun 2022 dalam memimpin upaya global untuk memulihkan ekonomi pascapandemi COVID-19. Artikel ini mengidentifikasi beberapa tantangan yang harus dihadapi Indonesia sebagai ketua G20, antara lain ketidakpastian ekonomi global, perubahan geopolitik yang cepat, serta berbagai isu sosial dan lingkungan yang mempengaruhi stabilitas ekonomi global. Artikel ini juga menyoroti beberapa kebijakan yang dapat dilakukan Indonesia dalam memfasilitasi pemulihan ekonomi global, antara lain peningkatan investasi di bidang kesehatan, infrastruktur dan digitalisasi, serta penguatan kerja sama multilateral untuk memastikan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, artikel ini juga membahas peluang yang tersedia bagi Indonesia untuk memperkuat perdagangan bebas dan terbuka, mempercepat digitalisasi, serta meningkatkan investasi di sektor strategis seperti energi dan industri. Kesimpulannya, artikel ini menyimpulkan bahwa Indonesia sebagai ketua G20 harus memimpin upaya

global untuk memulihkan ekonomi pasca-COVID-19 dengan mengadopsi kebijakan yang tepat dan memperkuat kerja sama multilateral. Artikel ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat posisinya dalam ekonomi global melalui presidensi G20 dan harus memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkuat ekonomi nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di seluruh dunia.⁸

- 3) Artikel "Indonesia's G20 Presidency and the Challenge of Reinvigorating Global Cooperation" oleh Dionisius Narjoko membahas tentang tantangan yang akan dihadapi oleh Indonesia sebagai ketua G20 dalam membangun kembali kerja sama global di tengah pandemi COVID-19 dan meningkatnya ketegangan geopolitik. Artikel ini menyoroti beberapa isu kunci yang perlu diperhatikan oleh Indonesia selama masa kepemimpinan G20, seperti memperkuat kerja sama multilateral dalam mengatasi pandemi COVID-19, mempromosikan perdagangan bebas dan terbuka, memperkuat ketahanan ekonomi, mempercepat transisi ke ekonomi berkelanjutan, dan meningkatkan inklusivitas dan kesetaraan gender dalam ekonomi global. Artikel ini menekankan bahwa Indonesia harus memanfaatkan kesempatan sebagai ketua G20 untuk memperkuat posisinya dalam ekonomi global, mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional, serta memperkuat posisinya sebagai negara yang berperan aktif dalam membangun kembali kerja sama global. Namun, artikel ini juga menyoroti beberapa tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam menjalankan tugasnya sebagai ketua

⁸ Lukman, R.A. 2021. *Indonesia's Priorities and Opportunities as G20 Chair in 2022*

G20, seperti meningkatnya ketegangan geopolitik dan konflik perdagangan antara negara-negara besar, serta ketidakpastian ekonomi global akibat pandemi COVID-19. Dalam kesimpulannya, artikel ini menekankan pentingnya memperkuat kerja sama multilateral dan mengatasi tantangan global secara bersama-sama untuk memastikan pemulihan ekonomi global yang berkelanjutan dan inklusif. Artikel ini menunjukkan bahwa Indonesia harus memanfaatkan kesempatan sebagai ketua G20 untuk memimpin upaya global dalam membangun kembali kerja sama global dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi global.⁹

2.2 Kerangka Teori dan Konsep

2.2.1 Teori Neoliberal Institusionalisme

Teori neoliberal institusional merupakan salah satu pandangan dalam bidang Hubungan Internasional yang berpijak pada paradigma liberalisme. Menurut Robert Keohane dalam buku Pengantar studi Hubungan Internasional, teori ini mengisyaratkan bahwa lembaga, rezim dan organisasi internasional, baik dalam skala global maupun regional, dapat memperkuat dan membantu kerjasama antar negara. Dalam hal ini lembaga atau organisasi internasional, serta seperangkat aturan yang dibentuk dapat mengatur perilaku negara dalam bidang tertentu.¹⁰

⁹ Narjoko, D. 2021. *Indonesia's G20 Presidency and the Challenge of Reinvigorating Global Cooperation*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

¹⁰ Robert, J. dkk. 2005. *Pengantar Studi Hubungan Internasional* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. ISBN: 979-3721-23-5

Pemikir yang menganut teori neoliberal institusional mengidentifikasi empat asumsi utama. Pertama, negara merupakan aktor penting dalam Hubungan Internasional, tetapi tidaklah satu-satunya aktor yang signifikan. Aktor non-negara juga memiliki peran dalam kerjasama internasional. Kedua, negara berusaha untuk memaksimalkan keuntungan melalui kerjasama dalam lingkungan yang kompetitif. Ketiga, kerjasama internasional tidak selalu lancar, namun negara akan beralih sumber daya dan loyalti jika mereka melihat keuntungan bersama dan kerjasama tersebut menyediakan kesempatan untuk mengamankan kepentingan nasional mereka. Keempat, kerjasama dan perjanjian internasional menghasilkan keuntungan absolut yang diinginkan oleh semua aktor, yaitu keuntungan yang dapat diperoleh setiap negara melalui interaksinya dengan negara lain melalui kerjasama. Teori neoliberal institusional berpendapat bahwa institusi internasional bertujuan untuk memajukan kerjasama antar negara. Dalam memperkuat argumen ini, pendekatan behavioralist digunakan oleh kaum liberal institusional. Untuk mengukur perluasan institusionalisasi antar negara, langkah empiris digunakan dengan mengukur dua dimensi, yaitu dimensi ruang lingkup dan dimensi kedalaman.¹¹

Teori neoliberal institusionalisme dalam konteks G20 merujuk pada pandangan bahwa lembaga-lembaga internasional dapat memfasilitasi kerjasama ekonomi antara negara-negara anggota G20. Teori ini juga berpendapat bahwa institusi dan organisasi internasional, serta aturan dan

¹¹ *Ibid.*

regulasi yang dibentuk, dapat memperkuat dan membantu kerja sama ekonomi antar negara. Dalam pandangan teori neoliberal institusionalisme, liberalisasi perdagangan dan investasi adalah cara yang efektif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di seluruh dunia. Oleh karena itu, lembaga-lembaga seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sangat penting dalam menjaga konsistensi kebijakan dan mencegah konflik perdagangan antar negara anggota. Namun, teori neoliberal institusionalisme juga menyadari bahwa masih terdapat tantangan dan kendala dalam mencapai tujuan-tujuan ini, seperti perbedaan dalam standar lingkungan dan sosial antara negara-negara anggota. Oleh karena itu, G20 perlu memperhatikan isu-isu global seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan sosial, dan kemiskinan untuk mencapai keberlanjutan dan inklusivitas dalam pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2.2.2 Teori Multilevel Governance

Menurut Gary Marks, *multilevel governance* mengacu pada sistem tata kelola yang terdiri dari beberapa tingkat pemerintahan yang saling terkait dan memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan. Menurut Marks, *multilevel governance* terbentuk karena adanya kebutuhan untuk mengatasi masalah yang melintasi batas-batas pemerintahan nasional, seperti masalah lingkungan, perdagangan internasional, atau keamanan. Dalam sistem *multilevel governance*, kekuasaan dan tanggung jawab dibagi di antara berbagai tingkat pemerintahan, mulai dari tingkat lokal hingga internasional. Marks juga membedakan antara *multilevel governance* dan

federalisme. Menurutnya, federalisme hanya terjadi ketika otoritas yang lebih tinggi memberikan kewenangan kepada otoritas yang lebih rendah, sedangkan *multilevel governance* dapat terjadi dalam situasi di mana berbagai tingkat pemerintahan saling terkait dan bekerja sama untuk mengatasi masalah bersama. Dalam pandangan Marks, *multilevel governance* tidak hanya mengacu pada pembagian kekuasaan di antara berbagai tingkat pemerintahan, tetapi juga melibatkan berbagai aktor non-pemerintah, seperti organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan masyarakat umum. Oleh karena itu, *multilevel governance* juga melibatkan dinamika hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam mengambil keputusan dan membangun kebijakan.¹²

Teori *multilevel governance* mengacu pada pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan yang terjadi pada berbagai tingkat pemerintahan, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional, serta melibatkan berbagai aktor non-pemerintah, seperti kelompok masyarakat sipil dan sektor swasta. Dalam konteks G20, teori ini dapat diaplikasikan pada upaya kerjasama antara negara-negara anggota dalam memecahkan masalah global. Dalam G20, terdapat berbagai forum dan platform yang memungkinkan negara-negara anggota untuk bekerja sama dalam berbagai bidang, seperti keuangan, perdagangan, energi, lingkungan, dan lain

¹² Gary Marks. (2021, August 2). *Multilevel governance*. Diakses pada 3 Maret 2023 melalui <https://garymarks.web.unc.edu/research/multilevel-governance/>

sebagainya. Selain itu, ada juga keterlibatan berbagai aktor non-pemerintah, seperti organisasi internasional, kelompok masyarakat sipil, dan sektor swasta, yang berperan dalam mendukung atau mengkritisi kebijakan yang diambil oleh negara-negara anggota G20. Dalam teori multilevel governance, penting untuk menekankan pentingnya koordinasi dan konsistensi kebijakan antar berbagai tingkat pemerintahan dan berbagai aktor yang terlibat. Dalam konteks G20, hal ini dapat diwujudkan melalui dialog yang terus-menerus antara para pemimpin negara, para pejabat tingkat menengah, dan para aktor non-pemerintah, serta melalui penyusunan agenda bersama dan rencana aksi yang mengintegrasikan berbagai aspek kebijakan. Dengan demikian, teori multilevel governance dapat membantu meningkatkan efektivitas kerjasama antar negara dalam mengatasi masalah global.¹³

2.2.3 Konsep Diplomasi Ekonomi

Diplomasi ekonomi adalah suatu proses negosiasi dan perundingan antara negara-negara yang bertujuan untuk mempromosikan kepentingan ekonomi masing-masing negara. Diplomasi ekonomi melibatkan penggunaan kebijakan dan strategi ekonomi untuk mencapai tujuan diplomasi yang lebih luas, seperti meningkatkan perdagangan, investasi, dan kerja sama ekonomi antara negara-negara. Hal ini juga dapat melibatkan perundingan mengenai isu-isu perdagangan internasional, seperti tarif dan

¹³ M., S.-J. (2015). *Theories and methods for the study of Multi-Level Environmental Governance*. <https://doi.org/10.17528/cifor/005541>

hambatan perdagangan, serta negosiasi mengenai investasi, hak kekayaan intelektual, dan kebijakan moneter. Diplomasi ekonomi juga melibatkan diplomasi publik dan pengaruh di tingkat internasional untuk memperkuat posisi ekonomi suatu negara di dunia global.¹⁴

Dalam era globalisasi yang didukung oleh kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi, hubungan internasional ditandai oleh interaksi berbagai jaringan yang saling terkait, termasuk hubungan bilateral, regional, dan multilateral. Meskipun ketiganya memiliki dinamika yang berbeda, diplomasi sebagai strategi mempersuasi aktor internasional lainnya tetap ditentukan oleh leverage politik dan ekonomi yang dimiliki suatu negara. Oleh karena itu, Indonesia perlu merumuskan strategi diplomasi yang komprehensif dan tepat sasaran untuk mendukung kepentingan nasionalnya. Strategi tersebut dapat disalurkan melalui mesin diplomasi bilateral, regional, atau multilateral, tergantung pada sasaran yang ingin dicapai. Selain itu, di era globalisasi ini, aktor-aktor internasional baru seperti perusahaan multinasional, organisasi non-pemerintah, dan hubungan antar-individu juga perlu dimanfaatkan dan dirangkul oleh pemerintah sebagai bagian dari strategi diplomasi. Meskipun aktor-aktor ini memiliki kepentingan yang berbeda-beda, kemampuan pemerintah untuk mengelola

¹⁴ Susanto, AB. 2021. *Diplomasi Ekonomi: Untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa*. Jakarta: Penerbit buku Kompas.

hubungan dengan mereka secara efektif dapat menjadi faktor penentu keberhasilan kebijakan luar negeri.¹⁵

Diplomasi ekonomi melalui G20 melibatkan perundingan dan negosiasi antara negara-negara anggota untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dalam berbagai hal, seperti perdagangan internasional, investasi, dan regulasi ekonomi. Salah satu tujuan diplomasi ekonomi melalui G20 adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi global dan mengurangi ketimpangan ekonomi antara negara-negara anggota. Hal ini dapat dilakukan melalui kerja sama dalam hal perdagangan internasional, pembangunan infrastruktur, investasi, dan transfer teknologi. Selain itu, diplomasi ekonomi melalui G20 juga melibatkan upaya untuk mengatasi masalah ekonomi global yang kompleks, seperti ketidakseimbangan perdagangan global, fluktuasi nilai tukar, dan regulasi keuangan internasional. Dengan bekerja sama melalui G20, negara-negara anggota dapat mencapai kesepakatan yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam mengatasi masalah-masalah ini dan mencapai tujuan ekonomi yang lebih luas.

2.3 Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka pemikiran, penulis akan menjelaskan mengenai bagaimana alur kerja dalam penelitian ini. Kerangka pemikiran dapat dilihat pada bagan

¹⁵ Kementerian Keuangan. *Diplomasi Ekonomi Indonesia, G20 Dan Tantangan global tahun 2013*. Diakses pada 3 Maret 2023 melalui https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/beritakajian/file/Diplomasi_ekonomi_Indonesia_G20_dan_tantangan_global_tahun_2013.pdf

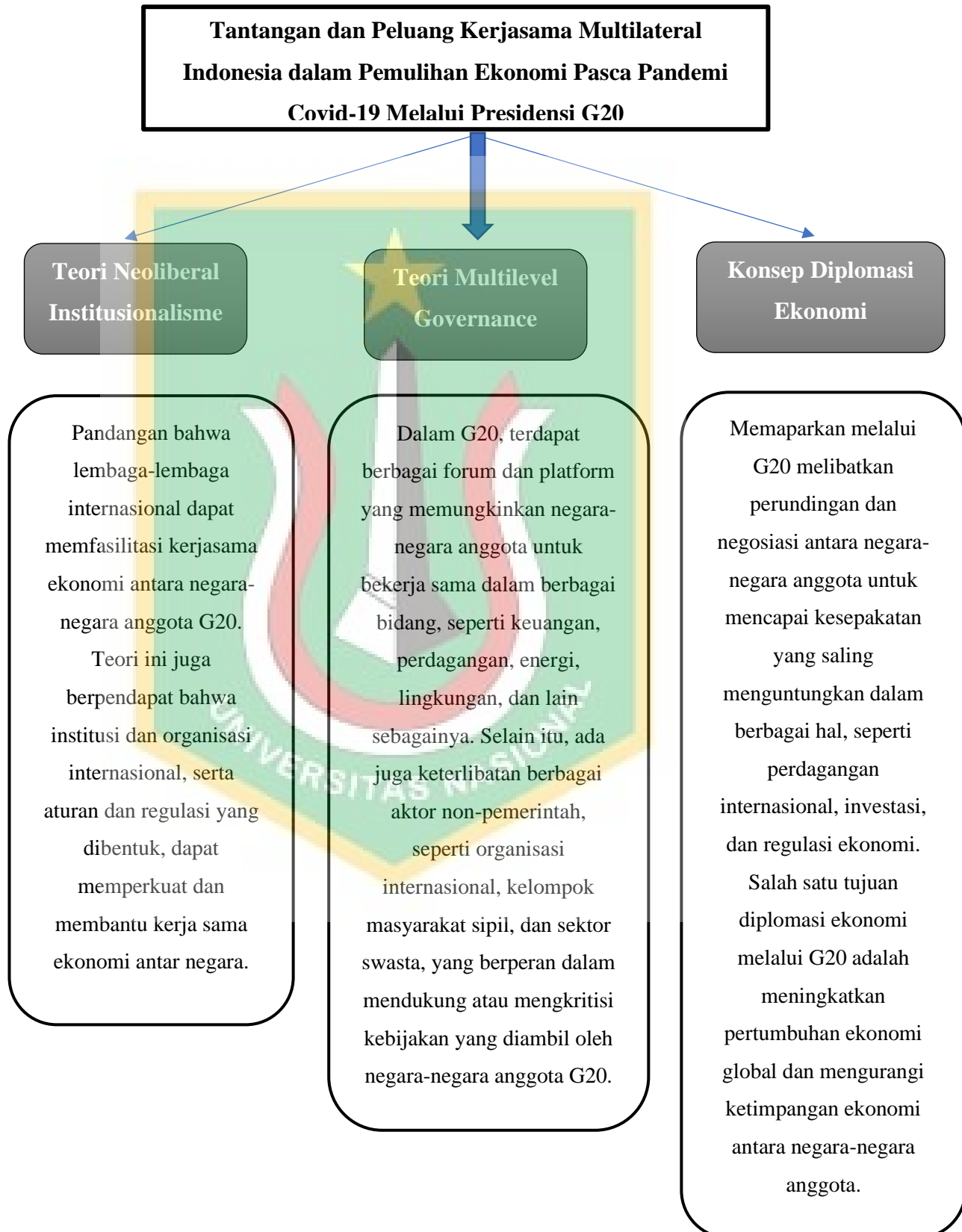
dibawah ini. Dalam penelitian ini, penulis akan berfokus pada tantangan dan peluang Kerjasama multilateral Indonesia melalui Presidensi G20 Tahun 2022 yang berdampak pada pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid 19. Dilatarbelakangi dengan Kerjasama multilateral Indonesia dalam bidang sistem Kesehatan, transformasi ekonomi dan digital serta transisi energi yang dinilai sebagai peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan kualitas multisektor dan multidimensi melalui Presidensi G20 tahun 2022. Serta penguatan Kerjasama multilateral, peningkatan beban utang publik, dan *public expose* yang menjadi tantangan utama pada Presidensi G20 tahun 2022.

Teori serta konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Neoliberal Institusionalisme, Teori *Multilevel Governance*, serta Konsep Diplomasi Ekonomi. Dimana Teori Neoliberal Institusionalisme akan menjawab pandangan bahwa lembaga-lembaga internasional dapat memfasilitasi kerjasama ekonomi antara negara-negara anggota G20. Teori ini juga berpendapat bahwa institusi dan organisasi internasional, serta aturan dan regulasi yang dibentuk, dapat memperkuat dan membantu kerja sama ekonomi antar negara. Teori *Multilevel Governance* akan menjawab upaya kerjasama antara negara-negara anggota dalam memecahkan masalah global. Dalam G20, terdapat berbagai forum dan platform yang memungkinkan negara-negara anggota untuk bekerja sama dalam berbagai bidang, seperti keuangan, perdagangan, energi, lingkungan, dan lain sebagainya. Selain itu, ada juga keterlibatan berbagai aktor non-pemerintah, seperti organisasi internasional, kelompok masyarakat sipil, dan sektor swasta, yang berperan dalam mendukung atau mengkritisi kebijakan yang diambil oleh negara-negara anggota

G20. Serta konsep diplomasi ekonomi yang akan memaparkan melalui G20 melibatkan perundingan dan negosiasi antara negara-negara anggota untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dalam berbagai hal, seperti perdagangan internasional, investasi, dan regulasi ekonomi. Salah satu tujuan diplomasi ekonomi melalui G20 adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi global dan mengurangi ketimpangan ekonomi antara negara-negara anggota.



2.4 Model Kerangka Pemikiran Penelitian



2.5 Aspek, Dimensi, dan Parameter

ASPEK	DIMENSI	PARAMETER
Peran Strategis Indonesia dalam Presidensi G20 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Kepentingan Indonesia • Presidensi G20 Tahun 2022 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan Akses Ekspor dalam Pasar Global • Wadah Mengekspos UMKM Indonesia
Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19 melalui Presidensi G20 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Disparitas Digital • Upaya Indonesia dalam Mengeluarkan Kebijakan • Agenda Presidensi G20 2022 	<ul style="list-style-type: none"> • Digitalisasi Ekonomi • Membangun Ekosistem Digitalisasi Ekonomi yang baik. • <i>Digital Economic Transformation</i>
Keberhasilan Diplomasi Ekonomi Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kegiatan Ekonomi Antar-Negara 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kepercayaan investasi pada Indonesia • Peningkatan kegiatan ekspor dan Kerjasama perdagangan internasional